

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Perkembangan dan kemajuan suatu ilmu pengetahuan dan teknologi semakin pesat dan terus maju seiring perkembangan jaman. Dapat dilihat dari penggunaan sehari-hari di kalangan umum masyarakat. Bukan menjadi sebuah trend, melainkan sebagai kewajiban untuk menggenggam informasi dan teknologi. Perkembangan informasi dan teknologi tidak dipungkiri dengan halnya perkembangan teknologi sdm dunia pada saat itu. Sebagai pengembang maupun ahli riset teknologi, dalam jangka panjang penyebaran informasi maupun teknologi harus saling bahu membahu membawa manusia menjadi orang yang modern serta melek pengetahuan teknologi dan informasi. Berkaitan dengan penggunaan sehari-hari perkembangan kehidupan berteknologi secara realtime harus mulai di usung mengingat pendalaman suatu wilayah dan lingkungan tidak bisa hanya tersebar dengan selembaran surat-surat yang semakin hari akan semakin mendorong untuk meningkatnya efek pemborosan. Untuk itu dibutuhkan suatu tenaga ahli dan pendukungnya agar Sistem Informasi dapat dimanajemen dengan baik sehingga menimbulkan efek efisiensi waktu dan biaya penggunaan dalam rangka percepatan penyebaran informasi tentang suatu wilayah. Sistem Informasi Manajemen yang bekerja dan menata sebuah wadah untuk menyalurkan arah dan tujuan informasi yang akan di tuju berdasarkan

pokok-pokok utama dari suatu keunggulan wilayah seperti pengembangan dan optimalisasi Sistem Informasi Manajemen tersebut.

Pada dasarnya sistem informasi desa merupakan sebuah sistem dengan tujuan untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelaksanaan dokumentasi data-data milik desa yang berguna dalam pencarian data dan mempercepat pelayanan penduduk (Jadja, 2012). Dengan demikian Sistem Informasi Manajemen Desa memiliki sebuah gagasan atas permasalahan yang harus dijawab atas beberapa masalah yang sering terjadi pada pelayanan masyarakat di tingkat desa. Meskipun cakupannya di tingkat desa, secara akumulatif akan menjadi pemasalahan yang lebih luas yaitu di tingkat nasional karena pemerintah desa adalah perpanjangan tangan dari pemerintah yang pelayanannya langsung berhadapan dengan masyarakat. Karena dekatnya pelayanan pemerintah desa dengan masyarakat dapat memberikan indikasi bahwa data-data tentang desa dan semua atribut-atribut lainnya seperti penduduk, potensi desa, profil desa, *statistic* desa yang lainnya adalah data yang paling real. Data-data dari desa ketika diakumulasikan, maka akan menjadi data nasional. Ketika data real yang di desa tidak valid yang disebabkan oleh faktor teknis maupun non teknis, maka data nasional pun akan menjadi tidak valid. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa dasar pembangunan bangsa adalah berdasarkan data real di lapangan dan itu diperoleh langsung dari perpanjangan tangan pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat yaitu pemerintah desa.

Permasalahan muncul ketika, kebutuhan data dari pemerintah pusat, tidak didukung oleh alat dan sumber daya manusia yang memadai. Kebutuhan dan format data yang dibutuhkan dari pusat biasanya tertuang dalam bentuk dokumen yang mempunyai dasar hukum. Setiap pemerintah desa harus patuh dan tunduk pada aturan main/format laporan yang baku dari pusat untuk keperluan penyeragaman dan mempermudah dalam penyusunan data. Kebutuhan tersebut tidak didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang memadai. Sehingga, banyak data yang diperlukan oleh pusat tidak dapat disampaikan dengan cepat, tepat dan akurat.

Untuk menyelesaikan permasalahan di atas, diperlukan sebuah sistem kerja yang meliputi sarana dan prasarana pengolahan data dalam bentuk Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dengan harapan bahwa pekerjaan berat pemerintah desa dalam mengumpulkan data pendukung (penduduk, statistik dan profile desa serta lainnya) akan menjadi lebih mudah.

Dalam perkembangan teknologi internet pemanfaatan teknologi saat ini merupakan sesuatu hal yang tidak bisa dihindarkan, karena kebutuhan informasi yang sangat cepat, dan tepat menjadi suatu kebutuhan utama disegala aspek. Salah satu teknologi yang paling berkembang adalah teknologi yang berbasis web yang sering disebut dengan internet. Teknologi ini sudah digunakan diberbagai bidang baik bisnis, pemerintahan, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Teknologi internet yang kini sudah mendarah daging harus dimanfaatkan secara optimal, keberadaan teknologi diharapkan juga bisa menjadi jawaban untuk menyamaratakan

kecepatan pelayanan, sebuah kemajuan jika pemerintah mulai mengadopsi teknologi tersebut sebagai infrastruktur utama pelayanan publik.

Menurut Ely Sufianti (2006) rendahnya kualitas pelayanan terjadi hampir pada semua aspek pelayanan publik, baik pada aspek pelayanan jasa, pelayanan administratif dan pelayanan barang. Untuk mengatasi masalah permasalahan tersebut dan sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan jaringan elektronik. Hal tersebut juga didasari oleh kenyataan bahwa masyarakat sudah semakin terbiasa dengan jaringan tersebut. Jaringan berbasis teknologi internet yang digunakan oleh pemerintah tersebut dikenal dengan nama e-government.

Dalam sektor publik, teknologi informasi dan komunikasi memiliki tujuan untuk mengoptimalkan proses pelayanan publik yang efisien, transparan dan efektif serta menjadi bagian penting dalam usaha membentuk struktur birokrasi dan proses klasik dari pelayanan yang berbelit belit. Alhasil sistem e-government dengan tersebut menjadi tawaran baik dalam penyebaran informasi di tingkat lokal (Eviana Septiana Rachman, 2017).

Ketersediaan data profil desa/kelurahan sangat penting karena sesuai dengan Permendagri No 12 Tahun 2007 data profil desa adalah dasar perencanaan program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Daryono., 2014). Dalam hal ini pun Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia adalah salah satu institusi Pemerintah

yang bertanggung jawab untuk mewujudkan hal tersebut melalui salah satu programnya yakni *e-government*. Kemajuan teknologi informasi memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemaslahatan masyarakat. Tentunya dalam dunia yang sudah mengglobal ini, kemajuan teknologi diperlukan dan dimanfaatkan dalam segala bidang. Salah satu bidang yang terkena sentuhan teknologi informasi adalah pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat. Artinya dalam era teknologi informasi ini, informasi telah dihubungkan oleh dengan sebuah gerbang atau “*gateway*” yang terintegrasi.

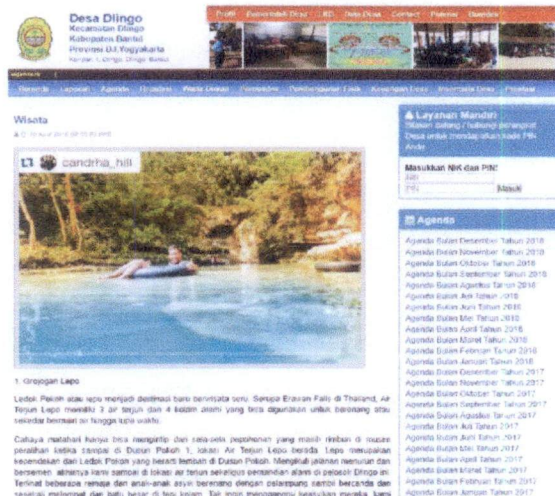
Dewasa ini, desa yang baik akan melakukan suatu penyediaan informasi umum dalam promosi potensi dan produk unggulan desa. Secara tidak langsung, kemajuan teknologi komunikasi dan informasi desa harus ditingkatkan dengan perkembangan dan sumber daya manusia yang mumpuni dengan melakukan suatu penciptaan potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Maka data yang di simpan dengan baik sangat mendukung kinerja pemerintahan desa sesuai dengan azas efisien dan efektif, pembukuan, akuntabilitas, keterkaitan, kejelasan, singkat dan padat serta logis dalam meyakinkan penyusunan perencanaan desa, perbaikan administrasi desa dan pelayanan publik (Mayowan, 2010). Selain itu pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses promosi potensi desa, juga bisa dimanfaatkan dengan pemanfaatan informasi dan komunikasi pemerintahan (*e-government*) akan dapat memberikan suatu informasi berupa

meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa itu sendiri.

Fokus penelitian kali ini berpusat di Dukuh Pokoh I (Satu) Desa Dlingo Kabupaten Bantul Yogyakarta. Melihat dari potensi dan produk lokal yang sangat baik untuk di promosikan sangat minim di lakukan publikasi oleh pihak-pihak yang terkait. Potensi yang sangat baik tersebut terbuang sia-sia jika dibiarkan begitu saja tanpa pendorong atau promotor dalam wadah promosi. Dilihat dari ruang publik digital yang ada di Pemerintah Desa Dlingo sebagai fasilitas promosi yang kurang *up to date*. Padahal Desa Dlingo memiliki sistem publikasi informasi berbasis web. Namun pada kenyataannya *website* yang diterbitkan masih belum memuaskan dari segi ramah pengunjung, informatif dan menarik. Terlihat pada sektor sumber daya manusia sebagai pengelola website desa maupun penggunaan sistem informasi desa tersebut belum memberikan daya tarik tersendiri pada *website* tersebut.

Proses pengembangan *website* secara umum dimulai dengan melakukan kajian dari sebuah *website* yang sudah ada sebelumnya, menemukan sisi yang kurang dan selanjutnya di teliti dan menjadi dasar pengoptimalisasian *website*. Dalam sebuah kajian dilakukan penelitian dan komparasi (membandingkan) dua buah *website* sebagai pertimbangan dalam menentukan "optimalisasi" dari sebuah *website* sebagai media promosi potensi dan produk usaha Desa.

Sebagai perbandingannya, dilakukan dengan *mereview* dan mengkomparasikan dua *website* desa di Indonesia, pada *website* Desa Dlingo memiliki tampilan yang memungkinkan pengunjung *web* merasa cukup interaktif dalam membacanya, namun pada tampilan dan maupun bacaan yang ada pada kolom wisata tersebut kurang begitu update atau terbaru. Disamping itu masih banyak kolom informasi potensi dan produk usaha yang belum di publikasi secara baik. Diantaranya untuk meningkatkan informasi maupun daya tarik para pembaca *website* masih tergolong rendah. Alhasil ini akan menjadi evaluasi yang sangat ditekan kan bila pengoptimalisasian *website* tersebut sudah semestinya terlaksana.



Gambar 1.1. Snapshot Website Desa Dlingo, Bantul  
(Sumber: [dlingo-bantul.desa.id](http://dlingo-bantul.desa.id))

Berbeda pada *website* selanjutnya, yaitu *website* Desa Selopamiro, pada kolom objek wisata sendiri masih tergolong *update* di tahun 2018. Publikasi konten wisata tersebut dinilai baik dalam segi pemaparan informasi obyek wisata dengan metode digital. Beberapa konten di dalamnya dibangun atau di publikasikan dengan banyak opsi dan tambahan baca selengkapnya.



Gambar 1.2 Snapshot Website Desa Selopamoro  
(Sumber: selopamoro-bantul.desa.id)

Hal ini bisa disimpulkan jika dilihat dari perbandingan *website* tersebut, sangat menarik jika bagaimana cara mengelolah dan mengoptimisasi seluruh aspek sistem informasi desa, dengan tujuan *website* desa sebagai media untuk mengoptimisasi potensi dan produk unggulan desa Dlingo tersebut. Sehingga data yang ditampilkan berdasarkan sistem informasi desa bisa memudahkan birokrat atau sumber daya masyarakat pemerintah desa melakukan promosi potensi dan produk usaha. Maka dari itu peneliti tertarik melakukan penelitian dengan harapan memberikan dorongan untuk mempelajari dan memahami bentuk Optimalisasi Sistem Informasi Manajemen Desa Dalam Mempromosikan Potensi dan Produk Usaha Dukuh Pokoh I Desa Dlingo Bantul.



## **1.2. RUMUSAN MASALAH**

Rumusan masalah pada umumnya adalah beberapa tahapan dalam membuat suatu karya ilmiah penelitian maupun lainnya yang dimana hal ini sangat penting di dalam suatu kegiatan penelitian. Sebagian poin-poin tersebut mengacu kepada inti dari suatu penelitian, baik teori-teori maupun metodologi penelitian. Temuan di lapangan menimbulkan efek yang sangat kuat dalam menunjang kegiatan penelitian tersebut. Adapun rumusan masalah yang muncul dari penelitian ini yaitu bagaimana optimalisasi Sistem Informasi Desa dalam mempromosikan potensi dan produk usaha Dusun Pokoh I Desa Dlingo Kabupaten Bantul?

## **1.3. TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian studi tentang Optimalisasi Penggunaan Sistem Informasi Desa dalam Mempromosikan Potensi dan Produk Usaha Dukuh Pokoh I Desa Dlingo Bantul. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui strategi optimalisasi sistem informasi desa sebagai media promosi potensi dan produk usaha Dukuh Pokoh I di lingkungan Pemerintahan Desa Dlingo Bantul.

## **1.4. MANFAAT PENELITIAN**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.4.1. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai pengembangan kegiatan dan kajian Sistem Informasi Manajemen Desa yang berkaitan dengan optimalisasi penggunaan sistem informasi desa dalam mempromosikan potensi maupun produk usaha desa sebagai

informasi pemerintahan desa kepada masyarakat maupun khalayak banyak.

1.4.2. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

- 1) Sebagai bahan kajian dan informasi pengetahuan serta pemanfaatan media digital elektronik kepada masyarakat itu sendiri. Hal ini sangat ditekankan kepada masyarakat agar ikut mengembangkan dan memanfaatkan teknologi sebagai media promosi potensi dan produk usahanya. Sebagai kekuatan media digital elektronik masyarakat juga dapat merasakan dengan sumber potensi perekonomian yang semakin meningkat. Manfaat praktis juga sebagai pendorong masyarakat berupa pengelolaan dan pengawasan terhadap isi maupun konten yang ditampilkan atau yang diberikan kepada masyarakat umum sebagai pembaca informasi pemerintahan desa di Internet sebagai bentuk pelaksanaan kemajuan informasi pemerintahan desa dalam hal promosi potensi dan produk lokal desa.
- 2) Sebagai referensi tugas maupun fungsi dari pemerintahan desa dalam pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Desa dalam pelaksanaan pemerintahannya melalui sistem *e-governance*. Dalam pengembangannya juga dimanfaatkan sebagai wadah promosi potensi dan produk lokal kepada khalayak umum. Sehingga hal ini menjadi suatu kekuatan dari jalannya pemerintahan desa tersebut.

### 1.5. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka mempunyai arti sebagai peninjauan kembali pustaka-pustaka yang terkait (*review of related literature*). Sesuai dengan arti tersebut, suatu tinjauan pustaka berfungsi sebagai peninjauan kembali (*review*) pustaka (laporan penelitian, dan sebagainya) tentang masalah yang berkaitan—tidak selalu harus tepat identik dengan bidang permasalahan yang dihadapi—tetapi termasuk pula yang seiring dan berkaitan (*collateral*) (Djunaedi, 2000). Dalam melakukan proses penelitian, peneliti menemukan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Diantaranya ada sepuluh judul yang dimuat pada tabel jurnal penelitian sebagai tinjauan pustaka. Penulis akan mengetahui akar permasalahan, pemilihan prosedur penelitian, mendalami landasan teori, mengkaji kelebihan dan kekurangan penelitian tersebut, menghindari duplikasi penelitian dan sebagai penunjang rumusan masalah. perbedaan yang dinilai sangat spesifik jika dilihat dari hasil temuan jurnal tersebut. Sepuluh jurnal yang ada diantaranya adalah sebagai berikut:

*Tabel 1.1 Jurnal Tinjauan Pustaka*

<b>NO</b>	<b>Penulis</b>	<b>Judul</b>	<b>Hasil Temuan</b>
1	Amalia Mukti Sugiharto	Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Melalui Sistem Informasi Desa (Studi Deskriptif Pada Desa Tulangan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo) Tahun 2018	Menjadi sebuah medium bagi perangkat desa dalam mempromosikan serta merevolusi penyelenggaraan pemerintah di tingkat desa berdasarkan cara maupun referensi sistem informasi desa yang ada. Platform Sistem Informasi Desa Dikelola oleh pemerintah desa untuk menyajikan beragam data informasi seputar kondisi desa sekaligus berperan dalam memenuhi pelayanan public bagi warga Desa Tulangan.
2	Musthafa, Aziz; Nahwa Utama, Shoffin	Iptek Bagi Masyarakat Sistem Informasi Manajemen Administrasi Desa Berbasis Web Di Desa Sekaran Kecamatan Siman-Ponorogo Tahun 2018	Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat pada Desa Sekaran Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo berlangsung dengan baik sesuai dengan rencana pengabdian. Pencapaian tujuan dan luaran dinyatakan berhasil dan diperkuat dengan hasil sebaran angket. Pelatihan berjalan dengan baik membuat perangkat mengerti penggunaan aplikasi SIMADES untuk pelayanan administrasi desa. Bentuk atau hasil yang akan dituju berbentuk informasi maupun peningkatan pelayanan administrasi pemerintahan desa berdasarkan kebutuhan perangkat desa dalam mempromosikan maupun mempublikasikan produk usaha desa.

3	Isa Bahroni, Andesita Prihantara	Rancang Bangun Sistem Informasi Administrasi Kependudukan E-Desa Berbasis Web (Studi Kasus) Di Kelurahan Tritih Kulon Cilacap Utara Tahun 2017	Proses pengolahan data kependudukan pada bagian pelayanan masih dilakukan secara paper base, proses pelayanan masyarakat berupa pencatatan dan penyimpanan data masih berbentuk arsip-arsip/berkas, sehingga proses belum cepat dan efektif. Proses pengolahan data yang dilakukan secara komputerisasi seperti penginputan dan pengkinian data serta pencarian data penduduk dalam melakukan proses pembuatan KK, KTP, Surat Keterangan Kelahiran, Kematian, Pendatang dan Pindah dapat meminimalisasikan kesalahan-kesalahan yang terjadi. Proses penyimpanan data yang sudah berbentuk database, kemungkinan tidak terjadi duplikasi data. Implementasi SIAK e-Desa di Kelurahan Tritih Kulon ini diharapkan dapat mempermudah, mempercepat dan memperlancar informasi data Kependudukan.
4	Ignatius Irvin Kurniawan	Pembangunan Sistem Informasi Desa Berbasis Web (Studi Kasus: Desa Girisekar) tahun 2014	Sistem berbasis web dengan menggunakan sistem framework codeigniter (CI) dan menggunakan database MySQL tools yang digunakan notepad++ dan xampp sebagai alat pengembangannya. Pengelolaan data penduduk, pemetaan dan menyebarkan informasi desa dan potensi desa yang berada di

			Kawasan Desa Girisekar. Sehingga Menghasilkan data dari sistem ini dapat bermanfaat untuk membantu pengembangan dan pembangunan desa.
5	Triyani Arita Fitri, Torkis Nasution, Herwin	Pengembangan Model Pelayanan Kantor Desa Terhadap Masyarakat Berbasis Mobile Computing Tahun 2015	Data dalam penelitian tersebut disusun oleh masyarakat dengan memperoleh layanan administrasi dari bagian di desa. Seperti pengurusan izin usaha, surat keterangan domisili, pengantar ke Kantor Camat atau berdasarkan hasil administratif. Dalam sistem ini aparatur desa berhubungan langsung dengan data digital aplikasi yang tersedia untuk setiap bagian dengan kemas secara terpisah. Komponen urama dari sistem ini adalah: komponen administratif, komponen BPD, komponen Sekdes, Komponen Ketua RW dan Pelaksana Teknis.
6	Eviana Septiana Rachman, Beni Noviyanto	Pemanfaatan E-Government Pada Desa Wonokarto Untuk Meningkatkan Akurasi Dan Informasi Potensi Desa Tahun 2017	Berhasil mengatasi keterbatasan karena dengan adanya E-Government ini masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan layanan dan informasi secara cepat dan akurat tanpa mengenal batas dan waktu serta dapat dilakukan dimanapun selama ada akses internet dan publikasi potensi yang ada pada Desa Wonokarto dapat dilakukan dengan mudah yakni dengan menggunakan sebuah sistem secara online yaitu <i>website</i> yang ada pada desa wonokarto.

7	Hartono, Dwiwarso Utomo, Edy Mulyanto	Electronic Government Pemberdayaan Pemerintah Dan Potensi Desa Berbasis Web Tahun 2010	Terbangunnya aplikasi Electronic Government untuk pemberdayaan pemerintah dan potensi desa berbasis web di kabupaten sragen maka terbentuk suatu database pemerintahan, potensi desa dan data pendukung peluang investasi yang datanya bersumber langsung dari beberapa desa/kelurahan di Kabupaten Sragen. Data- data yang tercakup dalam database merupakan data- data yang dapat digunakan sebagai informasi yang dapat digunakan oleh berbagai SKPD guna menunjang arah kebijakan pembangunan sertacalon investor untuk pertimbangan pengambilan keputusan investasi. Sistem tersebut merupakan salah satu media yang dapat diakses setiap saat oleh 208 desa/kelurahan yang memungkinkan penyediaan data yang selalu mutakhir.
8	Kusuma Dewi Arum Sari, Wahyu Agus Wirianto	Implementasi E- Government System Dalam Upaya Peningkatan Clean And Good Governance Di Indonesia Tahun 2012	Terjadinya kesenjangan dalam pengembangan pada instansi pemerintah di kawasan Indonesia tak terelakkan lagi. Contohnya, kesenjangan yang terjadi antara situs Pemprov Jatim dengan Pemprov Papua. Pemprov Jatim melalui kota Surabaya telah meningkatkan peranan TIK dalam melayani kepentingan publik melalui aplikasi layanan e-Sapa Warga yang mempermudah warga Surabaya dalam membuat KTP. Namun

			<p>pemanfaatan akan sistem e-government di Indonesia sangat dibutuhkan, maka diharapkan pemerintah lebih memperhatikan pelaksanaan e-government melalui penyempurnaan konsep dan strategi guna meningkatkan pengembangan e-government di seluruh pelosok negeri.</p>
9	Sulismadi, Wahyudi, Muslimin	<p>Model Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Menjalankan Fungsi Pemerintahan Berbasis Electronic Government (E-Government) Menuju Pembangunan Desa Berdaya Saing Tahun 2016</p>	<p>Penelitian ini menjelaskan dan memetakan tentang kapasitas pemerintah desa dalam menjalankan fungsi manajemen pemerintahan. Penjelasan dan pemetaan masalah kapasitas pemerintah desa tersebut bertujuan untuk merumuskan model kebaruan penguatan kapasitas pemerintah desa dalam menjalankan fungsi manajemen pemerintahan desa. Model tersebut diarahkan pada pemerintahan yang berbasis electronic government (E-Government).</p>
10	Erick S. Holle	<p>Pelayanan Publik Melalui Electronic Government: Upaya Meminimalisir Praktek Maladministrasi Dalam Meningkatkan Public Service Tahun 2011</p>	<p>Di Indonesia, peluang untuk itu sudah ada dengan dikeluarkannya Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Gov (electronic-Government framework) , salah satu tujuannya adalah memberikan pelayanan publik yang berkualitas yang memenuhi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).</p>



Pada tabel di atas dijelaskan temuan-temuan dari sepuluh artikel maupun jurnal-jurnal terdahulu. Kali ini penulis menarik kesimpulan bahwa temuan-temuan diatas memiliki perbedaan dan persamaan yang sangat dekat. Hanya saja berbeda dari bentuk pelaksanaan di lapangan. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa teori yang digunakan daripada artikel tersebut sama dengan peneliti gunakan. Hal yang membuat sangat berbeda yaitu proses meningkatkan atau mengoptimalisasikan dari Sistem Informasi Manajemen Desa dalam pelaksanaan promosi potensi dan produk usaha Dukuh Pokoh I Desa Dlingo Bantul.

## **1.6. KERANGKA DASAR TEORI**

Kerangka teori adalah sebuah struktur yang menggaris bawahi suatu penelitian dari mana asal maupun sumber yang penulis dapatkan. Berdasarkan judul, penulis mendapatkan tiga dasar-dasar teori yang memperkuat penelitian kelak. Hal ini merupakan jaringan hubungan antar variabel yang secara logis diterangkan, dikembangkan dan dielaborasi dari perumusan masalah yang telah diidentifikasi melalui wawancara, observasi, dan survei literature. Hubungan antar survei literature dan kerangka teoritis adalah survei literature meletakkan pondasi yang kuat untuk membangun kerangka teoritis.

### **1.6.1. Pemerintahan Desa**

Secara etimologi Desa Berasal dari kata swadesi bahasa sansekerta yang berarti wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan otomom (Deswimar, 2014). Adapun pengertian desa dalam

Undang-undang No. 6 tahun 2014 adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. P.J. Bouren dalam kutipan buku Hanif Nurcholis (Karto & Koesoemo, 2014) mengatakan Desa merupakan salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir saling mengenal dengan berbagai pekerjaan seperti pertanian, perikanan, usaha-usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam sekitarnya serta lingkungan emosionalnya terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan, dan fatwa-fatwa sosial.

Sedangkan pengertian pemerintahan desa dalam undang-undang tersebut adalah: 'Penyelegaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI.' Unsur penyelenggara pemerintahan tersebut disebut dengan pemerintah desa. Yang mana pemerintah desa dijabat oleh seorang Kepala Desa dan dibantu beberapa orang staff perangkat desa.

Dinamika masyarakat pada desa dapat terwadahi dalam tiga lembaga utama yaitu (Karto, Koesoemo, 2014):

- 1) Pemerintahan desa sebagai unsur berjalannya program pembangunan, pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakatnya.
- 2) Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai lembaga legislatif desa memiliki fungsi menampung, menyalurkan, serta mewujudkan aspirasi dan kepentingan masyarakatnya. Dalam hal ini lebih ditekankan kepada penetapan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan desa.
- 3) Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKMD), Karang Taruna, PKK dan kelompok pendukung lainnya sebagai media partner pemerintahan desa dalam upaya mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan untuk mengakomodikan aspirasi seperti kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam rangka pembangunan pelayanan pemerintahan guna menumbuhkembangkan partisipasi dan semangat gotong royong masyarakat desa tersebut.

Dengan mengacu pada ketentuan PP No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya. Perangkat Desa lainnya terdiri atas sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan.

#### **1.6.2. Sistem Informasi Manajemen**

Berasal dari kata sistem. Sistem adalah satu kesatuan yang saling menyatu dalam suatu ikatan atau lingkaran dengan membentuk suatu pola secara terstruktur dan sangat runtut sehingga semua bentuk informasi yang di dapat akan secara mudah tersebar ke titik dimana akan terjadi efek pengetahuan yang kuat. Dalam kaitannya sistem informasi manajemen tidak lepas dalam tuntutan pengembangan fungsi pemerintahan, baik internal maupun eksternal. Karena seiring tuntutan otonomi suatu daerah atau wilayah, di harapkan agar bisa menjalankan fungsi pemerintahan berbasis teknologi informasi atau electronic government (Sulismadi; Wahyudi, 2018).

Pemerintahan elektronik atau e-government (berasal dari kata Bahasa Inggris electronics government, juga disebut e-gov, digital government, online government atau dalam konteks tertentu transformational government) adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. Electronic government dapat

diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses pemerintahan yang demokratis. Model penyampaian yang utama adalah *Government-to-Citizen* atau *Government-to-Customer (G2C)*, *Government-toBusiness (G2B)* serta *Government-to-Government (G2G)*. Keuntungan yang paling diharapkan dari electronic government adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik. Menurut Janet Caldwell (2001) mendefinisikan E-Government bukanlah sebuah perubahan secara fundamental yang berjangka pendek pada pemerintahan dan pemerintahan dan bukan pula sebagai awal dari permulaan era industriliasi. Artinya adalah bahwa e-government merupakan sebuah modernisasi pemanfaatan teknologi yang secara garis bukan sebuah perubahan yang sangat mendasar didalam sebuah tata pemerintahan yang dipastikan akan berjalan dalam jangka panjang dan bukan pula membuktikan bahwa ini merupakan awal dari sebuah proses pertumbuhan dan perubahan sosial.

Adapun beberapa kesiapan menuju keberhasilan e-government menurut Heeks (2001 dalam (Hartono, Utomo, & Mulyanto, 2010)) yaitu:

- 1) Legalitas/hukum. Dibutuhkannya perangkat hukum untuk mengantisipasi kejahatan digital, melindungi kerahasiaan, keamanan data atau informasi transaksi

digital perorangan, badan usaha dan instansi pemerintahan.

- 2) Instansi/kelembagaan. Adanya badan atau instansi khusus yang menangani sistem *e-government* yang memberikan layanan informasi kepada masyarakat termasuk layanan digital.
- 3) SDM. Sistem kepegawaian perlu adanya peningkatan dan pengembangan untuk berkerja secara profesional dalam bidang telematika untuk ikut berperan praktis dalam keberlangsungan *e-government* milik pemerintah.
- 4) Teknologi. Terbilang mahal, namun menimbulkan peluang kerjasama dengan swasta perlu dikembangkan dalam membangun infrastruktur teknologi untuk mendukung *e-Government*.
- 5) Pendukung, kapasitas, dan jumlah.
- 6) Kepemimpinan, pemangku kepentingan, transparansi, keuangan, teknologi, inovasi, dan pemahaman dasar politik.

Jenis layanan *e-government* secara umum dapat dikelompokkan dalam tiga jenis, antara lain (Indrajit, Rudianto, & Zainuddin, 2007) : (1) Jenis layanan yang bertujuan untuk penyediaan informasi seperti visi dan misi pemerintah, berbagai peraturan perundang-undangan, prosedur pendirian usaha, berbagai data kependudukan, pertanian dan perdagangan. Untuk jenis

layanan yang pertama ini, pembangunan aplikasi e-government sangat bertumpu pada penciptaan halaman Web yang menarik dan komunikatif. (2) Jenis layanan yang bersifat komunikasi interaktif dua arah, seperti konsultasi perpajakan, diskusi tentang rancangan undang-undang dan lain sebagainya. Untuk jenis layanan ini, maka aplikasi e-government perlu kelengkapan fasilitas seperti video konferensi, atau aplikasi chatting dan email. (3) Jenis layanan yang bersifat transaksi, seperti permohonan KTP, IMB, pembayaran wajib pajak, listrik, PBB, air, telepon secara online, sistem e-procurement. Dengan jenis layanan tersebut, maka aplikasi e-government juga harus dilengkapi dengan sistem informasi on-line yang mendukung pencatatan setiap transaksi yang terjadi. Karena seiring tuntutan otonomi suatu daerah atau wilayah, di harapkan agar bisa menjalankan fungsi pemerintahan berbasis teknologi informasi atau *electronic government* (Sulismadi; Wahyudi, 2018). Beberapa contoh penerapan sistem informasi manajemen yaitu:

- 1) ***Enterprise resource Planning*** meliputi keuangan, SDM, pemasaran, operasional, dan pengelolaan persediaan.
- 2) ***Supply Chain Management*** meliputi suplai bahan baku kepada konsumen.
- 3) ***Transaction Processing System*** meliputi inventaris maupun manajemen gaji.

- 4) *Office Automation System* yaitu dengan arti perusahaan dengan cara mengintegrasikan server-server komputer pada setiap user di perusahaan. Contohnya adalah email.
- 5) *Knowledge Work System* yaitu mengintegrasikan satu pengetahuan baru ke dalam organisasi. Dengan ini, diharapkan para tenaga ahli dapat menerapkannya dalam pekerjaan mereka.
- 6) *Informatic Management System* yaitu berfungsi untuk mendukung spektrum tugas-tugas dalam organisasi, fungsi informasi dengan program komputerisasi, seperti e-procurement.
- 7) *Decision Support System* yaitu mengamati lingkungan dalam perusahaan.
- 8) *Expert System dan Artificial Intelligent* dengan menggunakan kecerdasan buatan untuk menganalisa pemecahan masalah dengan menggunakan pengetahuan tenaga ahli yang telah diprogram ke dalamnya. Contohnya, sistem jadwal mekanik.
- 9) *Group Decision Support System dan Computer-Support Collaborative Work System* yaitu dengan mencari solusi lewat pengumpulan pengetahuan dalam satu kelompok, bukan per individu. Biasanya berbentuk kuesioner, konsultasi, dan skenario.



10) *Executive Support System* yaitu sebuah sistem membantu manajer dalam berinteraksi dengan lingkungan perusahaan dengan berpegang pada grafik dan pendukung komunikasi lainnya.

### 1.6.3. E-Governance

Secara umum, e-Governance merujuk kepada tata kelola pemerintahan dan memiliki arti yang kuat yaitu sebagai wujud dari governance (tata kelola pemerintahan) yang dijalankan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan pelayanan publik kepada masyarakat berbasis teknologi. Menurut *OECD* dan *World Bank* menjelaskan bahwa *e-governance* lebih kepada memajemen suatu sistem yang solid dan bertanggung jawab, selaras dengan demokrasi dan pasar yang efisien, anti intervensi, terhindar dari unsur KKN dalam politik maupun administrasi, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan framework bagi tubuh stakeholder.

Ada tujuan stratefis dari e-governance adalah mendorong untuk menyederhanakan penyelenggaraan pemerintahan bagi sesama pihak yaitu pemerintah, masyarakat, dan privat sector (Backus, 2001). Dalam pelaksanaan *e-governance*, terdapat 3 pelaku utama yaitu:

1. Pemerintah.

Pemerintah sebagai penentu arah kebijakan yang memegang peran penting di lingkup pemberian regulasi, izin, pemantauan, dan menjalankan aspirasi yang telah masyarakat sampaikan mewakili daerah dan negara dalam kerjasama dengan pelaku bisnis serta dengan negara lainnya.

2. Masyarakat.

Masyarakat merupakan kelompok atau pelaku dalam berjalannya *e-governance* sebagai pemantau dalam menjalankan pemerintahannya. Baik dalam hal memberikan masukan, kritik, penikmat layanan yang diberikan oleh pemerintah, serta menjadi sarana penunjang yang diperlukan baik pemerintah maupun lingkungan swasta, dalam artian kebutuhan sumber daya manusia.

3. Pengusaha, swasta, dan pihak terkait.

Di dalam lingkungan ini terdapat beberapa kelompok perorangan, organisasi, yang terlibat di dalam kegiatan bisnis, industri, penjualan, pembelian dan distribusi. Pelaku bisnis ini secara otomatis membentuk koneksi *Government to Business (G2B)*. Pelaksanaan *e-governance* adalah sebagai motor penggerak dalam penyediaan sumber daya manusia dan teknologi dalam

implementasi e-government dan e-governance untuk pemerintah dan masyarakat.

Adapun pengertian lain dari e-governance adalah suatu sistem manajemen informasi dan layanan masyarakat berbasis internet untuk merekam dan melacak informasi publik, dan memberikan akses penuh kepada layanan publik oleh instansi pemerintahan (Astuti, 2005).

#### **1.6.4. Optimalisasi**

Pada hakekatnya optimalisasi yaitu gambaran peningkatan suatu kegiatan atau keberlangsungan kehidupan dengan arah yang lebih baik melalui metode-metode penting yang saling berkesinambungan. Optimalisasi berasal dari kata optimal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008) bahwa optimal yaitu terbaik. Jika ditarik maknanya secara luas optimalisasi adalah menjadikan sesuatu menjadi lebih baik atau lebih tinggi dibanding sebelumnya dengan proses dan waktu yang ditentukan, sehingga dijelaskan dengan serangkaian proses yang dilakukan secara sistematis dengan tujuan untuk meninggikan volume dan kualitas trafik kunjungan melalui mesin pencari menuju situs web tertentu dengan memanfaatkan mekanisme kerja atau algoritma mesin pencari tersebut.

Berdasarkan pengertian di atas, pengertian optimalisasi adalah suatu proses yang dikerjakan dengan cara terbaik pada suatu

pekerjaan agar mendapatkan keuntungan tanpa harus mengurangi kualitas pekerjaan sebelumnya.

## **1.7. DEFINISI KONSEPTUAL**

Secara umum, definisi konseptual (Mardapi, 2011) merupakan keyakinan yang dalam pada suatu gagasan, kegiatan atau suatu objek. Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapatkan dari konsep ilmu atau teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang didapatkan pada tinjauan pustaka atau kalau boleh dikatakan oleh penulis merupakan ringkasan dari tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis sesuai variabel yang diteliti. Dalam hal ini variabel penarikan dijelaskan dengan batasan suatu konsep secara singkat, padat dan jelas. Bentuk penelitian ini didasari adanya konsep atau dasar yang menguatkan pada penelitian ini seperti teori-teori yang kuat. Ada tiga teori yang di gunakan sebagai patokan atau dasar utama penelitian, diantaranya:

### **1.7.1. Pemerintah Desa**

Secara konstitusi (*State Secretariat, 2014*) desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga adanya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) juga memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Desa untuk menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, melakukan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakatnya.

### **1.7.2. Sistem Informasi Manajemen**

Manajemen sistem Informasi merupakan pemcakupan perencanaan proses pengorganisasian serta pengawasan data yang diolah suatu organisasi tertentu. Disimpulkan menjadi sistem yang mengolah serta mengorganisasikan data informasi yang berguna untuk mendukung tugas pokok dan fungsi dalam suatu instansi. Perkembangan sistem informasi manajemen sendiri mempunyai elemen-elemen penting yang di butuhkan untuk kelancaran suatu sistem yang dijalankan seperti perangkat keras maupun perangkat lunak lainnya.

### **1.7.3. E-Government**

*E-government* adalah pemakaian atau penggunaan teknologi informasi yang meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan pihak-pihak lain. Atau definisi *e-government* yang lainnya adalah merupakan kependekan dari “elektronik pemerintah”, dapat dikenal *e-gov*, pemerintah digital, *online* pemerintah ataupun pemerintah transformasi. *e-government* merupakan sebuah inti dari sistem pemerintahan yang di elektronikasi berdasarkan kebutuhan

suatu instansi guna meningkatkan efisiensi dan kemudahan akses informasi pemerintah.

Pada intinya *E-Government* (Junaidi & Paribrata, 2015) adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara Pemerintah dan pihak-pihak lain. Penggunaan teknologi informasi ini kemudian menghasilkan hubungan bentuk baru, seperti: *G2C (Government to Citizen)*, *G2B (Government to Business Enterprises)* dan *G2G (Government to Government-inter agency relationship)*.

#### **1.8. DEFINISI OPERASIONAL**

Defenisi operasional (Saifuddin Azwar 2007:72 dalam Munadhiroh, 2007) adalah suatu sistem defenisi yang memiliki arti tunggal dan diterima secara objektif bilamana indikatornya tidak terlihat. Suatu defenisi mengenai variabel yang dirumuskan berdasarkan kriteria-kriteria variabel yang diamati. Dalam penelitian ini disajikan dalam beberapa indikator tentang Sistem Informasi Manajemen Desa berdasarkan teori di atas, hal ini menentukan identifikasi atau batasan untuk melihat sejauh mana optimalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Dlingo untuk promosi potensi dan produk usaha Dusun Pokoh I dan pihak yang terkait di dalamnya. Sebagai bentuk penarikan batasan ciri spesifik yang lebih substantif dengan menggunakan teori kongkrit dari Heeks (2001 dalam (Hartono et al., 2010)).

Ke enam indikator tersebut sebagai alat dalam mencari data yang akan dibutuhkan dan digunakan dengan mempertimbangkan kesesuaian data di lapangan, dengan demikian data akan disesuaikan dalam mencari dan mengolah data yang akan diperoleh. Indikator operasional penelitian dimuat pada tabel berikut:

**Tabel 1.2 Defenisi Operasional Penelitian**

<b>Indikator</b>	<b>Operasional Penelitian</b>
<b>Legalitas atau hukum</b>	Batasan yang digunakan untuk keberlangsungan sistem informasi manajemen desa dalam pelaksanaan dan digunakan sebagai perisai maupun proteksi dari ancaman kejahatan digital, melindungi data-data kerahasiaan atau informasi penting yang tersemat di dalam badan usaha dan instansi pemerintahan.
<b>Instansi atau kelembagaan</b>	Sebagai lembaga yang menangani sistem e-government dengan memberikan layanan informasi kepada masyarakat termasuk layanan digital.
<b>Sumber Daya Manusia</b>	Indikator sumber daya manusia ini merujuk kepada sistem kepegawaian yang menjalankan semua sistem informasi manajemen desa dengan melihat kompetensi yang dimiliki oleh promotor maupun yang menjalankan proses publikasi informasi digital desa.
<b>Sistem Informasi Manajemen</b>	Wadah pelaksanaan publikasi informasi digital desa yang digunakan dengan menilai unsur efektif dan efisiensi dari sistem di gunakan. Termasuk <i>website</i> desa yang digunakan dalam proses publikasi potensi dan produk usaha desa.
<b>Pendukung, Kapasitas, dan Jumlah</b>	Perangkat yang digunakan seperti komputer pendukung, jumlah perangkat yang digunakan dalam proses berjalannya sistem informasi manajemen desa untuk mempublikasi informasi desa.
<b>Kepemimpinan, Pemangku Kepentingan, Transparansi, Keuangan, Teknologi dan inovasi</b>	Keterkaitan pemerintah desa sebagai pendorong dalam pelaksanaan publikasi informasi desa dengan sistem digital. Hal ini dilihat dari pola kepemimpinan, keterbukaan keuangan desa, pemahaman teknologi, inovasi atau pembaruan.

Indikator tersebut menjadi batasan dan gambaran secara spesifik untuk melihat batasan dalam pelaksanaan penelitian tersebut, dilakukan beberapa tahapan maupun indikator sebagai bentuk optimalisasi sistem informasi desa dan juga peningkatan pengelolaan website desa agar berjalan sebagaimana mestinya.

## **1.9. METODOLOGI PENELITIAN**

Metodologi penelitian berasal dari kata “metode” yang artinya cara melakukan sesuatu, dan “logos” yaitu ilmu atau pengetahuan. Sehingga metodologi artinya yaitu cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai titik tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan dengan dasar untuk mencari, mencatat, merekam, merumuskan, dan menganalisa menjadi suatu runtutan laporan. Dalam istilah penelitian, Mohammad Ali (dalam Priyono, 2016) adalah suatu cara untuk memahami sesuatu dengan melalui penyelidikan atau melalui usaha mencari bukti-bukti yang muncul, dengan masalah yang di dapat dengan perolehan pemecahan masalah secara hati-hati.

Apabila di simpulkan, metodologi penelitian merupakan suatu proses yang dijalani dengan berbagai tahap untuk mencapai pemahaman dan ditetapkan secara bertanggung jawab secara ilmiah dan data yang diperoleh tersebut di dapat untuk membangun memperoleh pemahaman baru, dengan inti penelitian itu sendiri. Timbulnya penelitian tersebut dibekali dengan dasar keingintahuan suatu orang untuk mencapai kepuasan mutlak dengan menerima realitas yang diterima sebagai dasar terminasi yang mantap. Hasil



akhir yang di dapat berupa bentuk fisik tertulis dengan beberapa pemikiran dan pandangan melalui interpretasi peneliti (Raco, 2010). Maka dari itu penelitian kualitatif lebih banyak terpengaruh dengan bentuk refleksi pribadi pengetahuan dasar, latar belakang sosial, kreatifitas, dan kemampuan individual peneliti.

### **1.9.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif-kualitatif. Berdasarkan sumber yang ada tipe deskriptif merupakan corak lain dari kualitatif dengan pengandaian berupa teks. Karena untuk mendapatkan arti yang terdalam tidak mungkin diperoleh hanya dalam satu bentuk angka, karena angka itu sendiri hanya berbentuk simbol (Raco, 2010). Sebagai bentuk penelitian deskriptif kualitatif, secara runtut dibentuk berdasarkan dengan perolehan data yang kongkrit melalui pendalaman dan pemahaman sumber data, sehingga proses yang dilakukan menjadi mudah diteliti dan dipahami.

Beberapa alasan dalam menggunakan yaitu sesuai dengan judul yang dipaparkan yaitu Optimalisasi Sistem Informasi Manajemen Desa Dalam Mempromosikan Potensi dan Produk Usaha lingkup Dukuh Pokoh I Desa Dlingo Bantul. Peneliti berusaha mengumpulkan data-data realitas untuk diteliti secara deskriptif sesuai dengan rumusan masalah, tujuan dan indikator penelitian yang telah ditetapkan terkait dengan Sistem Informasi

Desa dalam mempromosikan potensi dan produk usaha Dukuh Pokoh I Desa Dlingo Bantul.

### **1.9.2. Lokasi penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bantul Yogyakarta, bertempat di Instansi Pemerintah Desa Dlingo dengan fokus penelitian potensi dan produk usaha dari Dukuh Pokoh I.

### **1.9.3. Subjek penelitian**

Subjek penelitian kali ini yaitu pola kolaborasi penelitian berdasarkan dari narasumber yang dituju sebagai pengelola Sistem Informasi Manajemen Desa, khususnya pada website sebagai wadah promosi potensi dan produk usaha dari Dukuh Pokoh I Desa Dlingo Bantul

### **1.9.4. Unit analisa**

Sesuai dengan permasalahan yang ada pada pokok pembahasan masalah dalam penelitian ini, maka unit analisa pada penelitian ini adalah Optimalisasi Sistem Informasi Manajemen yang ada di Desa Dlingo untuk mempromosikan potensi dan Produk Usaha Dukuh Pokoh I.

### **1.9.5. Jenis data**

Jenis data yang di gunakan berupa teks, kata-kata tertulis, laman *website*, frasa atau simbol yang menggambarkan atau mempresentasikan media website dan peristiwa-peristiwa publikasi informasi media di dalam *website*.

### 1.9.6. Sumber data

Terdapat beberapa sumber data yang akan di ulas secara mendalam melalui data primer maupun data sekunder.

#### 1) Data Primer

Data primer merupakan data yang di peroleh langsung melalui wawancara ke beberapa anggota Pemerintah Desa Dlingo Kabupaten Bantul oleh peneliti.

Data primer penelitian ini berbentuk tabel yang menjelaskan sumber data yang di dapat.

*Tabel 1.3 Data Primer Penelitian*

<b>Nama Data</b>	<b>Sumber Data</b>
Kolaborasi Pemerintah dalam promosi potensi dan produk usaha Dukuh Pokoh I (satu)	Pemerintah Desa dan Diskominfo
Sinergitas Pemerintah dalam publikasi potensi dan produk usaha Dukuh Pokoh I (satu) secara digital	Pemerintah Desa, Diskominfo
Visi, Misi, dan tujuan dalam Optimalisasi SIM Desa Dlingo dalam Promosi Potensi dan Produk Usaha Dukuh Pokoh I	Pemerintah Desa, Diskominfo
Penguatan tujuan bersama dalam Optimalisasi Sistem Informasi Manajemen Desa Dlingo dalam Promosi Potensi dan Produk Usaha Dukuh Pokoh I (direalisasikan dalam bentuk program kerja para pengelola website desa)	Pemerintah Desa, Diskominfo
Terlaksananya program kerja promosi potensi dan produk usaha Dukuh Pokoh I (Satu)	Pemerintah Desa, Diskominfo
Tepat waktu, tepat biaya, tepat sasaran dalam pelaksanaan program pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Website Desa sebagai wadah promosi potensi dan produk usaha Dukuh Pokoh I (Satu).	Pemerintah Desa, Diskominfo
Akses data yang mudah, bagi pemerintah dan media ruang publikasi potensi dan produk usaha Dukuh Pokoh I melalui website desa	Pemerintah Desa, Diskominfo
Pertanggungjawaban dari pelaksanaan program Sistem Informasi Manajemen website desa dan/atau tugas kewajiban publikasi potensi dan produk usaha Dukuh Pokoh I	Pemerintah Desa, Diskominfo
Aktif memberikan kontribusi (baik dalam bentuk ide/pemikiran, dana, sarana maupun prasarana) dari publikasi potensi dan produk usaha Dukuh Pokoh I pada sistem informasi desa berbentuk website.	Pemerintah Desa, Diskominfo
Standarisasi pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Website desa.	Pemerintah Desa, Diskominfo
Mudahnya akses informasi bagi semua orang terkait dengan Optimalisasi SIM Desa Dlingo dalam Promosi Potensi dan Produk Usaha Dukuh Pokoh I melalui website desa.	Pemerintah Desa, Diskominfo
Koordinasi antar para pengelola website dalam aspek publikasi potensi dan produk usaha Dukuh Pokoh I.	Pemerintah Desa

Sistem informasi manajemen dan publikasi konten potensi dan Produk Usaha Dukuh Pokoh I	Pemerintah Desa
Petugas struktural dan petugas lapangan (Pemerintah) yang mengolah dan mempublikasi Potensin dan Produk Usaha Dukuh Pokoh I.	Pemerintah Desa
Anggaran program pengelolaan Sistem Informasi Manajemen yaitu Website desa sebagai ruang <i>display</i> potensi dan produk usaha Dukuh Pokoh I	Pemerintah Desa
Fasilitas penunjang sistem informasi manajemen desa dalam pengelolaan website desa sebagai ruang publikasi potensi dan produk usaha Dukuh Pokoh I	Pemerintah Desa

Sumber : Diolah dari Peneliti, 2018

Data primer ini diolah sedemikian rupa sebagai referensi sumber informasi inti dalam pencarian data maupun pengolahan data Sistem Informasi Manajemen website desa yang dimana ruang tersebut sebagai wadah publikasi potensi dan produk usaha Dukuh Pokoh I, Desa Dlingo Kabupaten Bantul. Demikian pula data yang di dapat akan di bandingkan jika dibutuhkan untuk melihat pra dan pasca penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperluas informasi data yang diperoleh. Untuk mendapatkan informasi suatu data dengan desain batasan yang akurat akan dilakukan pembatasan dalam mencari informasi yang akan diperoleh, seperti membentuk efektifitas data agar data tersebut dapat diolah sesuai dengan objek penelitian yang akan dilaksanakan.

## 2) Data Sekunder Penelitian

Data sekunder bersifat tidak terkait dalam mendapatkan data yang bersumber dari internal Pemerintah Desa. Data secara langsung di dapat melalui sumber data *website* resmi desa, jurnal artikel, surat kabar maupun media sosial.

**Tabel 1.4 Data Sekunder Penelitian**

<b>Nama Data</b>	<b>Sumber Data</b>
Terlaksananya program SIM Desa Dlinngo dalam Promosi Potensi dan Produk Usaha Dukuh Pokoh I	Pemerintah Desa, Diskominfo
Akses data yang mudah, bagi pemerintah dan masyarakat umum	Pemerintah Desa, Diskominfo
Pertanggungjawaban dari pelaksanaan SIM Desa Dlinngo dalam Promosi Potensi dan Produk Usaha Dukuh Pokoh I	Pemerintah Desa
Landasan hukum SIM Desa Dlinngo dalam Promosi Potensi dan Produk Usaha Dukuh Pokoh I	Pemerintah Desa
Prioritas isu program Optimalisasi SIM Desa Dlinngo dalam Promosi Potensi dan Produk Usaha Dukuh Pokoh I	Pemerintah Desa
Standarisasi pengelolaan SIM Desa Dlinngo dalam Promosi Potensi dan Produk Usaha Dukuh Pokoh I	Pemerintah Desa, Diskominfo
Prosedur pengelolaan SIM Desa Dlinngo dalam Promosi Potensi dan Produk Usaha Dukuh Pokoh I	Pemerintah Desa, Diskominfo
Proses perencanaan SIM Desa Dlinngo dalam Promosi Potensi dan Produk Usaha Dukuh Pokoh I.	Pemerintah Desa, Diskominfo, Pemerintah Daerah

Sumber : Diolah dari Peneliti, 2018

Informasi Manajemen dan proses perencanaan promosi potensi dan produk usaha Dukuh Pokoh I Desa Dlingo Kabupaten Bantul.

### 1.9.7. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan proses pencarian suatu pokok permasalahan yang terjadi di lapangan dengan sumber dan gambaran inti pencarian proses pemecahan masalah. Peneliti melakukan beberapa cara yang dilakukan sesuai pada inti permasalahan yaitu Pengoptimalisasi Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Desa Dlingo Guna Mempromosikan Potensi Dan Produk Lokal Dukuh Pokoh I.

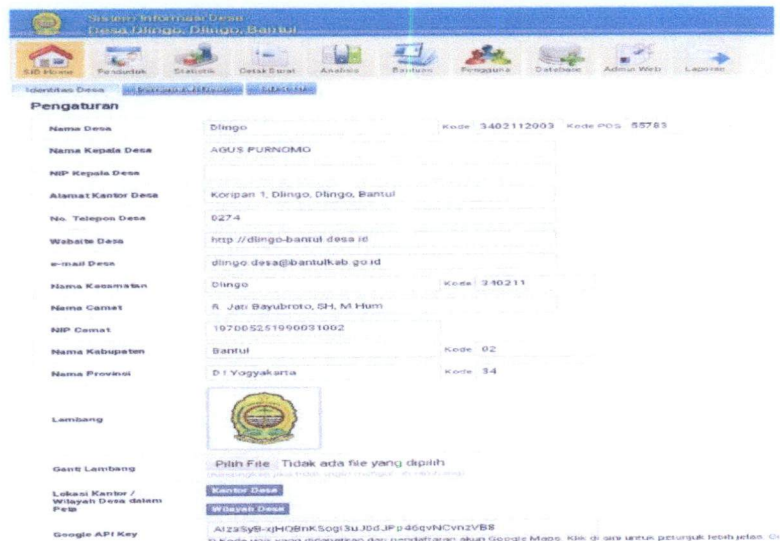
Peneliti melakukan tiga cara untuk mendapatkan data secara tepat dan benar yaitu obeservasi, Wawancara dan Dokumentasi.

Ketiga metode tersebut memperoleh data dengan cara triangulasi (Raco, 2010).

### a. Observasi

Agar memenuhi semua data yang akan diteliti, peneliti mengamati ke lapangan untuk mengamati kondisi permasalahan di tempat. Peneliti ditekankan untuk mengulas lebih dalam terkait hambatan yang ada pada masalah tersebut. Sehingga mendorong untuk peneliti lebih detail untuk menggali informasi pada website dalam Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Desa.

Hasil observasi di buktikan dengan turun ke lokasi penelitian untuk mengamati dan mengambil data dengan cara *screenshot* pada laman website dan aplikasi sistem informasi desa.



Gambar 1.3. Snapshot Menu SID Home  
(sumber: admin sistem informasi Desa, 2019)

#### **b. Wawancara**

Cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai konsep penelitian. Pedoman wawancara yang digunakan berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan, *depth interview* (wawancara mendalam) bertanya langsung pada obyek penelitian. Adapun panduan wawancara dalam penelitian ini terlampir.

#### **c. Dokumentasi**

Peneliti melakukan beberapa dokumentasi terkait isi website melalui media digital. Dokumentasi ini bisa berbentuk material yang tertulis maupun tercetak secara fisik. Dokumentasi tersebut berupa memorabilia atau korespondensi. Ada juga yang berupa audiovisual (Raco, 2010).

#### **1.9.8. Teknik analisa data**

Cara menganalisa data dalam penelitian ini dengan menyusun menggunakan analisa deskriptif, hal ini diperoleh diklasifikasikan dengan bentuk penjabaran kata-kata atau kalimat yang terpisah menurut bagian untuk memperoleh kesimpulan. Data-data yang dikumpulkan berupa teks kalimat, gambaran, dan bukan berupa angka-angka. Sehingga laporan penelitian ini akan memuat tentang kutipan-kutipan data untuk menyajikan gambaran laporan tersebut.

Data tersebut diperoleh dari naskah observasi, wawancara dan analisis dokumentasi menjadi sebuah isi.

Teknik analisa data (Miles dan Huberman, 1992 dalam Agusta, 2003) yang digunakan adalah teknik analisa deskriptif, menjelaskan fenomena secara singkat dengan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan, diantaranya (Agusta, 2003):

- 1) **Reduksi data:** proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data mentah atau data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Seperti membentuk suatu kerucut data, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu di sampaikan, pengelompokan data dengan cara sedemikian mungkin, sehingga kesimpulan akhir dapat di ambil intinya.

Reduksi data meliputi :

- a. Meringkas data
  - b. Pengkodean
  - c. Menelusuri tema
  - d. Membuang gugus-gugus data
- 2) **Penyajian data:** penyusunan informasi yang kompleks ke dalam suatu bentuk yang sistematis, sehingga menjadi lebih selektif dan sederhana serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan data dan pengambilan tindakan. Dalam penyajian data di bentuk suatu penggabungan data dan disusun,



sehingga akan ada bentuk penarikan kesimpulan dan tindakan.

Bentuk dari penyediaan data yaitu:

- a. Teks naratif: catatan lapangan.
- b. Matriks, grafik, jaringan dan bagan. Bentuk ini menggabungkan informasi, nantinya akan muncul pendapat apakah sudah tepat atau sebaiknya dilakukan analisis kembali.

3) **Penarikan kesimpulan:** tahapan akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan data-data yang telah diperoleh dari observasi, interview dan analisis isi. Kesimpulan-kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan. Hal ini di verifikasi selama penelitian berlangsung dengan melakukan cara:

- a. Memikirkan ulang selama penulisan.
- b. Tinjauan ulang di lapangan.
- c. Pengembangan dan peninjauan kembali secara intersubyektif.
- d. Penempatan salinan suatu temuan dalam perangkat data yang lain.